

**Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan  
Pekalongan Tahun 2004 - 2013**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Nama** : **Widhi Priyo Wasiso**  
**Nomor Mahasiswa** : **12313229**  
**Jurusan** : **Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota  
di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004 - 2013**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Widhi Priyo Wasiso  
Nomor Mahasiswa : 12 313 229  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2017**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penulis,



Widhi Priyo Wasiso

**PENGESAHAN**

Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan

Pekalongan Tahun 2004 – 2013

Nama : Widhi Priyo Wasiso

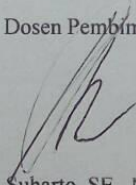
Nomor Mahasiswa : 12313229

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Suharto, SE., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH EKS  
KERESIDENAN TAHUN 2004-2013**

Disusun Oleh : **WIDHI PRIYO WASISO**

Nomor Mahasiswa : **12313229**

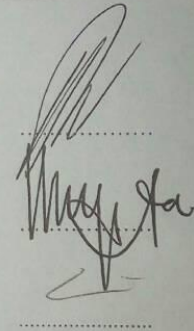
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 20 April 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## **MOTTO**

“Ajining diri soko lathi, ajining rogo soko busono.”

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.” – R.A Kartini

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya.” – Ali Bin Abi Thalib

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Dua orang tua terhebat dalam hidup saya, Ibu Sarminah, S.Pdi dan Bapak Alm. Romadhon, S.P
- ❖ Kedua adik tersayang, Kalih dan Uyung

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pengatur semesta alam, yang telah memberikan kesehatan, waktu, kekuatan, kesabaran serta melimpahkan rahmat dan hidayah dan karuniaNya serta kesempatan dan kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul, "*Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004 - 2013*". Diajukan guna memperoleh gelar sarjana, di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad saw. atas perjuangan, pelajaran, dan panutan yang baik bagi seluruh umat.
3. Keluarga tercinta, Ibu Sarminah, S.Pdidan Bapak Alm. Romadhon, S.P yang selalu memberikan dukungan melalui doa, materi, dan kasih sayang yang tidak akan pernah mampu dibalas oleh penulis. Tidak lupa untuk adik-adiksaya yang selalu memberi semangat dan dukungan, Kaleh dan Uyung.
4. Bapak Suharto S.E., M.Si. selaku pembimbing skripsi dengan sabar telah membagi ilmu dan waktunya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. D. Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
7. Seluruh pengajar dan Staff di Jurusan Ilmu Ekonomi FE Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terimakasih atas semua ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi 2012, Vivi, Cahya, Nopan, Mbah Tio, Dani, Agung, Ranggi, Panic dll, teman-teman kosan Aji Soko Kos, Abdul, Tri Panda, Pulung, Jumato, Agung, Ilham dll. Dan buat kekasihku Putri Ayu Puspita Dewi, S.Pd yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih waktu, pengalaman, ilmu, suka-duka, keceriaan, penerimaan, kekeluargaan dan pelajaran hidupnya.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Karena keterbatasan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penulis,

Widhi Priyo Wasiso

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan Ujian .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Halaman Kata Pengantar .....	vii
Halaman Daftar Isi .....	ix
Halaman Daftar Tabel .....	xii
Halaman Daftar Gambar .....	xii
Halaman Abstraksi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kajian Pustaka .....	9

2.2.	Landasan Teori .....	12
2.2.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	12
2.2.1.1.	Pengertian Produk Regional Bruto .....	12
2.2.1.2.	Agregat Produk Domestik Regional Bruto .....	14
2.2.1.3.	Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto.....	15
2.2.2.	Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.2.2.1.	Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.2.2.2.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.2.2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	21
2.2.3.	Teori Modern .....	22
2.2.3.1.	Harold-Domar .....	22
2.2.3.2.	Slow-swan.....	23
2.2.3.3.	Teori Schumpeter .....	24
2.2.4.	Ketimpangan.....	25
2.2.4.1.	Definisi Ketimpangan .....	25
2.2.4.2.	Ketimpangan Pembangunan Daerah.....	26
2.2.4.3.	Faktor-Faktor Ketimpangan.....	27
2.2.5.	Kebijakan Ekonomi dan Ketimpangan.....	28
2.2.6.	Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.2.7.	Hepotesis Kuznets.....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Sampel dan Data .....	32
3.2. Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	32
3.3. Metode Analisa Data .....	32
3.3.1. Tipologi Klassen.....	33
3.3.2. Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Daerah .....	35
3.3.2.1. Indeks Ketimpangan Williamson.....	35
3.3.2.2. Indeks Enthropy Theil.....	36
3.3.3. Pembuktian Hipotesis Kuznets .....	37

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis.....	41
4.1.1. Tipologi Klassen.....	41
4.1.2. Indeks Ketimpangan Williamson .....	45
4.1.3. Indeks Enthropy Theil .....	47
4.1.4. Hipotesis Kuznets .....	50
4.2. Pembahasan .....	53
4.2.1. Tipologi Pertumbuhan Ekonomi.....	53
4.2.2. Tingkat Ketimpangan antar Daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.....	54
4.2.3. Hipotesis Kuznets .....	54

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan.....	56
5.1.1. Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen .....	56
5.1.2. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Williamson.....	57
5.1.3. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Enthropy Theil.....	57
5.1.4. Hipotesis Kuznets .....	58
5.2.Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.....	4
3.1 Klarifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen.....	34
4.1 Rata-rata PDRB PerKapitadan Rata-Rata Pertumbuhan Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2003-2013 .....	42
4.2 Indeks Ketimpangan Williamson Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2003-2013 .....	46
4.3 Indeks Ketimpangan Entropy Theil Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2003-2013 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kurva korelasi antara Indeks Entropy Theil dengan pertumbuhan PDRB .....	39
3.2 Kurva korelasi antara Indeks Williamson dengan pertumbuhan PDRB.....	40
4.1 Rata-rata Polad StrukturPerekonomianWilayah Eks Karesidenan PekalonganMenurut TipologiKlassen Tahun 2004-2013 .....	43
4.2 Grafik Indeks WilliamsonWilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013 .....	47
4.3 Grafik Indeks Entropy TheilWilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013 .....	49
4.4 Grafik Hipotesis Kuznets Indeks Ketimpangan Williamson dengan Pertumbuhan PDRBWilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2004-2013 .....	51
4.5 Grafik Hipotesis Kuznets Indeks Ketimpangan Entropy Theil dengan Pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013 .....	52

## ***Abstraksi***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dan pembuktian Hipotesis Kuznets mengenai kurva “U” terbalik di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dalam periode waktu 10 tahun mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013.*

*Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 10 tahun data observasi mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Data di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Hipotesis Kuznets “U” terbalik.*

*Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 7 kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan terbagi menjadi empat kategori, yaitu: daerah makmur, daerah tertinggal dalam proses membangun, daerah makmur yang sedang menurun, dan kategori daerah tertinggal. Hasil perhitungan indeks ketimpangan Williamson adalah nilai ketimpangan PDRB yang terjadi di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mengalami kenaikan secara terus menerus. Sedangkan untuk indeks ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan hasilnya fluktuatif. Dalam penelitian ini hipotesis Kuznets belum terbukti di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson dan indeks ketimpangan Entropy Theil.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting karena dapat dipakai untuk menilai kinerja perkembangan perekonomian suatu negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan tingkat kegiatan ekonomi secara dinamis dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang menjadi indikator moneter, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, melek huruf, kesejahteraan dan kemakmuran (Arsyad, 2010). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik juga diperlukan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal meningkatnya pendapatan perkapita, tetapi juga distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi sendiri diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang merata, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diikuti dengan distribusi hasil pembangunan secara merata. Salah satu faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal yang ditanamkan dalam suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan produktifitas yang dapat menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dengan meningkatnya PDRB maka secara langsung pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Ukuran pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan setiap daerah memiliki PDRB berbeda seperti modal yang ditanamkan pada daerah tersebut, sumber daya yang dimiliki, dan infrastruktur yang tersedia. Ditambah dengan perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Hal ini sudah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi membentuk kawasan kerja sama antar daerah yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan. Tujuan dari pembentukan kerjasama ini adalah daerah dalam suatu kawasan saling bekerjasama dan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan. Salah satu kawasan strategi dari sudut perkembangan kepentingan ekonomi adalah di eks Karesidenan Pekalongan yaitu meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.

Indikator-indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional antara lain: pertumbuhan *output*, pertumbuhan *output* perpekerja, pertumbuhan *output* perkapita. Pada umumnya, patokan-patokan tersebut memiliki keterkaitan yang erat (Harvey Armstrong dan Jim Tayler, 1993).

Pembangunan yang dilakukan tidak selalu terjadi dengan merata. Kesenjangan daerah menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, namun di beberapa daerah lain mengalami hal yang berbeda yaitu mengalami pertumbuhan yang melambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan di karenakan sumber-sumber yang dimiliki daerah tersebut. Penanam modal lebih cenderung menanamkan modalnya di daerah yang memiliki fasilitas infrastruktur yang baik.

**Tabel 1.1**

**PDRB di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Atas Dasar Harga**

**Konstan 2000 Tahun 2004-2013**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Total</b>	<b>Rata-rata</b>
Kab. Batang	24885376,7 7	2263476,0 0
Kab. Pekalongan	33753098,7 4	3065439,7 3
Kab. Pemasang	35916562,1 1	3262350,5 9
Kab. Tegal	37437769,8 5	3397763,8 3
Kab. Brebes	57069333,2 4	5182143,5 8

Kota Pekalongan	21830608,4 1	1985252,5 6
Kota Tegal	13247192,1 6	1202209,0 1

Sumber: BPS Jawa Tengah

Walaupun secara geografis Kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan ini memiliki wilayah yang berdekatan, hal ini tidak menjadikan sebuah kesamaan dalam mencapai hasil pembangunan. Karena masing-masing pemerintah daerah memiliki program pembangunan yang berbeda-beda. Hal ini tercermin dalam raihan PDRB di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pembangunan yang terjadi antardaerah.

Daerah yang memiliki rata-rata PDRB tinggi dari tahun 2004-2013 adalah Kabupaten Brebes sebesar Rp 5.182.143.580.000, sedangkan rata-rata PDRB terendah adalah Kota Tegal sebesar Rp 1.202.209.010.000. Dari data di atas terlihat adanya ketimpangan nilai rata-rata yang cukup tinggi. Secara umum PDRB di Wilayah eks-Karesidenan Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2004-2013. Namun tetap saja terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota. Dengan adanya dugaan ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang hal tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan dan ketimpangan

ekonomi yang terjadi di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013. Atas pemikiran tersebut, maka penulis mengambil judul **“Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004 – 2013”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipapakan dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana klasifikasi struktur perekonomian antar kabupaten/kota berdasarkan tingkat pendapatan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan ?
- b. Bagaimana tingkat ketimpangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan ?
- c. Apakah hipotesis Kuznets tentang kurva “U” terbalik terbukti di di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan ?

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengklasifikasi struktur perekonomian antar kabupaten/kota berdasarkan tingkat pendapatan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan.

- b. Untuk menghitung tingkat ketimpangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang terjadi antar kabupaten/kota di di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan.
- c. Untuk membuktikan hipotesis Kuznets tentang kurva “U” terbalik berlaku atau tidak di di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran, yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan alternatif oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah dan sebagai sumber informasi tentang kinerja masing-masing sektor serta mengambil kebijakan atas terjadinya ketimpangan.
- b. Mengetahui lebih dalam tentang potensi masing-masing daerah di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan (Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal).

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I     Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sintematika penulisan.

### **BAB II   Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV Analisa Data dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan mengenai keadaan obyek penelitian, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, analisis ketimpangan pembangunan wilayah, serta pembuktian Hipotesis Kuznets dan analisis data.

### **BAB V Kesimpulan dan Implikasi**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan implikasi, serta saran yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sehingga kedepannya bagi pengambilan kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Rizkiya (2014), yang menganalisis tentang ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2012. Dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, Kepulauan Riau tidak ada satu daerah pun yang masuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Lingga, Karimun, Natuna, dan Kota Tanjung Pinang masuk dalam kategori daerah yang maju, namun tertekan. Kategori daerah yang berkembang cepat meliputi daerah Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Untuk daerah yang relatif tertinggal terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Ambas.

PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2012 sebesar 0,862. Secara umum ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau yang dihitung dengan indeks Williamson memiliki kecenderungan menurun. Dari tahun 2009 sebesar 0,913 dan 0,858 pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,863 dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi sebesar 0,815. Untuk Indeks Theil juga mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2009, 2010 dan 2011 nilai indeks mengalami penurunan dari 5,988; 5,814; dan 5,811. Tahun 2012 sempat naik menjadi sebesar 5,896. Hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2012.

Peneliti Putu Mahesa Eka (2013), menganalisis tentang ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gianyar tahun 1993-2009,

menggunakan alat analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan daerah menunjukkan Kecamatan di Kabupaten Gianyar terbagi menjadi empat klasifikasi yang ada. Sebanyak empat Kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tegallang berada pada kuadran IV, Kecamatan Payangan berada pada kuadran III dan Kecamatan Tampaksiring berada pada kuadran II yakni daerah maju tapi tertekan. Kecamatan Ubud berada pada kuadran I yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gianyar periode 1993-2009 antar kecamatan tersebut mengalami peningkatan. Rata-rata angka indeks Williamson sebesar 0,300. Kurva hubungan antara indeks Williamson dengan pendapatan perkapita menunjukkan bentuk U terbalik, dimana dapat dikatakan hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Gianyar pada periode 1993-2009.

Agus Eko Prasetyo (2007), dalam penelitiannya tentang analisis ketimpangan daerah di Propinsi Jawa Tengah tahun 1998-2004, menggunakan alat analisis Indeks Gini, Indeks Kuznets, Indeks Oshima pada era sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah terdapat ketimpangan pendapatan rendah yaitu rata-rata 0,25555 untuk Indeks Gini, 0,3657 untuk Indeks Kuznets dan Indeks Oshima sebesar 0,3031.

Tetapi pada Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan pendapatan daerah yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,7672 untuk rata-rata ketimpangan sebelum otonomi, 0,7693 untuk rata-rata selama otonomi daerah. Dari hasil regresi berganda menunjukkan bahwa PDRB, PAD, PKP (Pengeluaran Konsumsi Penduduk), dan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) berpengaruh terhadap Indeks

Oshima pada era sebelum otonomi daerah. Sedangkan pada masa otonomi daerah hanya PKP saja yang berpengaruh terhadap Indeks Oshima.

Menurut Sutarno dan Kuncoro (2003), yang telah melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas pada tahun 1993-2000. Dengan menggunakan Tipologi Klassen, Kabupaten Banyumas dibagi menjadi empat klasifikasi. Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur termasuk dalam kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kecamatan yang masuk dalam daerah yang maju tapi tertekan adalah Kecamatan Wangon, Kecamatan Somagede, dan Kecamatan Baturaden. Selanjutnya adalah Kecamatan Kebasen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karangwelas, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Purwokerto Utara termasuk dalam kecamatan yang berkembang cepat. Terakhir adalah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kemrajen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekucen, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Sumbang termasuk dalam daerah yang relatif tertinggal.

Indeks Williamson menunjukkan hasil PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas periode 1993-2000 dengan rata-rata 0,426 lebih rendah jika dibandingkan dengan ketimpangan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,691. Ketimpangan yang terjadi memiliki kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 1993 nilai indeks sebesar 0,35 naik menjadi 0,47 pada tahun 2000. Pada tahun 1998 indeks ketimpangan menurun dari tahun 1997 yaitu dari 0,44 menjadi 0,43,

walaupun kembali naik pada tahun 1999 sebesar 0,48. Indeks Entropy Theil memiliki rata-rata sebesar 0,0396. Dalam indeks ini juga terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan. Dimana pada tahun 1993 indeks memiliki nilai sebesar 0,032 menjadi 0,046 pada tahun 2000. Hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson.

## **2.2 LANDASAN TEORI**

### **2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

#### **2.2.1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun). PDRB merupakan salah satu ukuran atau indikator yang secara luas digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah. Kinerja perekonomian wilayah tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung angka PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi adalah pendekatan dengan menghitung jumlah nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi di kelompokkan dalam sembilan lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas,

dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor netto (merupakan ekspor dikurangi impor). Biasanya ditulis dalam rumus:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

Dimana:

Y = PDRB

C = Konsumsi rumah tangga

G = Konsumsi pemerintah

I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

3. Pendekatan Pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Termasuk juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB ini juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah DPRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan yang kedua adalah PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

#### **2.2.1.2 Agregat Produk Domestik Regional Bruto**

Secara teoritis agregat PDRB dibedakan menjadi:

- a. PDRB Atas dasar harga berlaku

Jumlah nilai produksi, nilai pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

- b. PDRB atas dasar harga konstan

Jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai berdasarkan tahun dasar.

- c. PDRB atas dasar harga pasar

Diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara.

d. PDRN (Produk Domestik Regional Neto)

Selisih antara PDRB atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan. Penyusutan tersebut adalah nilai susut barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut digunakan dalam proses produksi.

e. PDRB atas dasar biaya faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan biaya pasar adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi.

f. Pendapatan Regional

Jika PDRB atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang masuk dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke luar wilayah, akan diperoleh Produksi Regional neto atau disebut pendapatan regional.

g. Pendapatan per kapita

Bila pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di region/daerah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk.

### **2.2.1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto**

Kegunaan dari angka-angka yang disajikan oleh PDRB adalah dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, baik mengenai struktur ekonomi dimasa lalu, keadaan yang sedang berjalan maupun kemungkinan-kemungkinan

dimasa yang akan datang. PDRB harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dan apabila data ini dibagi dengan data jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk per kapita yang dapat digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain. Dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi disuatu daerah dengan cara menyajikan PDRB atas dasar harga konstan bersama-sama dengan harga yang berlaku.

Penyajian PDRB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di suatu wilayah. Bila angka PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja atau jumlah input yang digunakan akan dapat menggambarkan tingkat produktifitas secara sektoral maupun menyeluruh. Hubungan fungsional antara sektor satu dengan sektor lain dan kenaikan output suatu sektor mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada sektor-sektor lain dapat dilihat dari penyajian dalam bentuk input-output. Jika ingein mengetahui gambaran bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi, dikonsumsi, diinvestasikan maupun diekspor, dan bagaimana sumber-sumber pembiayaan terhadap konsumsi, investasi maupun ekspor/impor maka dapat dilihat pada penyajian PDRB dalam bentuk neraca Regional.

## **2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Disetiap masa ke masa selalu ada pradigma baru tentang teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Adelman (1961) ada tiga penyebab pendorong perubahan teori

pertumbuhan ekonomi yaitu, pertama adanya perubahan ideologi, kedua adanya revolusi dan inovasi teknologi, dan ketiga adalah adanya perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GNP dan GDP tanpa memandang kenaikan GNP dan GDP itu sendiri lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tidak melihat apakah terjadi perubahan struktur ekonomi dan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). GNP (*Gross National Product*) sendiri adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh warga negara yang bekerja meskipun pekerja tersebut bekerja di negara lain. Sedangkan, GDP (*Gross Domestic Product*) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara, meskipun barang dan jasa tersebut merupakan hasil dari pekerja luar negeri atau bukan warga negara yang sedang bekerja di negara tersebut. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah :

$$g = \frac{GDP_1 - GDP_0}{GDP_0} \times 100$$

Dimana:

$g$  = presentase tingkat pertumbuhan ekonomi

$GDP_1$  = *Gross domestic product* tahun terterntu

$GDP_0$  = *Gross domestic product* tahun sebelumnya

Menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Kuznet dalam Todaro (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kapasitas dalam jangka

panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat ekonom, yaitu pertumbuhan ekonomi secara umum adalah kemampuan peningkatan produksi yang terjadi dari tahun sebelumnya dalam suatu perekonomian.

#### **2.2.2.2 Komponen Pertumbuhan Ekonomi**

Mengenai komponen pertumbuhan, dijelaskan oleh Michael Todaro (2006). Komponen pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga komponen yang sangat penting bagi setiap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi modal, dapat diperoleh jika sebagian pendapatan yang diterima ditabung dan diinvestasikan yang bertujuan untuk meningkatkan output dan pendapatan dimasa depan. Investasi untuk peningkatan stok modal fisik suatu negara yaitu pabrik-pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baku memungkinkan untuk meningkatkan pencapaian tingkat output. Investasi dalam insfrastruktur sosial dan ekonomi seperti jalan-jalan, listrik, air dan sanitasi, komunikasi juga berfungsi sebagai fasilitas untuk mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi. Investasi juga harus diberikan dalam hal sumber daya manusia, berguna untuk meningkatkan kualitas pekerja, seperti sekolah formal, program-program kejuruan, pelatihan sambil bekerja dan pendidikan informal yang dapat meningkatkan keterampilan agar efektifitas dalam bekerja meningkat. Perbaikan di bidang kesehatan secara signifikan juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja.

2. Populasi dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang besar maka tersedia pula jumlah pekerja yang produktif yang akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik. Namun, hal ini masih diragukan apakah pertumbuhan penawaran tenaga kerja yang cepat dinegara berkembang seperti halnya Indonesia akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap kemajuan ekonomi. Lebih jelasnya, hal itu ternyata tergantung kepada kemampuan sistem perekonomian menyerap dan mempekerjakan secara produktif disetiap pertambahan tenaga kerja karena kemampuan ini sangat berhubungan dengan faktor keterampilan manajerial dan administratif.
3. Kemajuan teknologi bagi sebagian ekonom adalah faktor yang paling penting dalam pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bertujuan agar lebih efisien dan efektif dalam kegiatan produksi. Klasifikasi kemajuan teknologi dibagi menjadi tiga yaitu, yang pertama adalah kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi jika tingkat output yang dicapai sama dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, tenaga kerja digantikan oleh teknologi atau mesin dengan asumsi memiliki modal yang sama namun output yang didapat lebih tinggi dengan mengurangi pekerja. Ketiga adalah kemajuan teknologi yang hemat modal, hal ini jarang

terjadi di negara-negara maju, namun masih diterapkan di negara-negara berkembang karena negara berkembang relatif masih banyak tenaga kerja yang menganggur jadi kemajuan teknologi hemat modal cocok untuk diterapkan di negara berkembang.

Sukirno (2004), menerangkan beberapa faktor penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya.

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hutan dan hasil laut, serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal yang bertambah dan teknologi yang modern memegang peranan penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi.

4. Sistem ekonomi dan sikap masyarakat

Sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat tentunya mendorong terjadinya proses pertumbuhan ekonomi, serta didorong dengan sikap masyarakat yang mau hidup berkembang.

### **2.2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi regional. Alasannya adalah karena pertumbuhan

merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada juga daerah yang tumbuh lambat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Sangat disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, tetapi sedemikian jauh pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan wilayah. Target pertumbuhan ekonomi ternyata bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan (Sjafrizal, 2008).

### **2.2.3 Teori Modern**

#### **2.2.3.1 Harold-Domar**

Teori Harold-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes yang menyangkut peranan investasi

dalam jangka panjang. Menurut kedua ekonom itu, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh ( lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, investasi menambah stok kapital misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan dan sebagainya (Boediono, 1985:59).

Hubungan antara stok kapital dengan penawaran agregat adalah asetiap penambahan stok kapital masyarakat meningkat pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output yang dimaksud adalah output yang potensial biasa yang dihasilkan dengan stok kapital (kapital pabrik) yang ada (Boediono, 1985:60).

Pertumbuhan alami dalam sistem Harold yang sederhana adalah persentase pertumbuhan satuan tenaga kerja efisien pertahun, sebagai kondisi pertumbuhan seimbang, maka output dan capital harus juga tumbuh dengan laju pertumbuhan yang alami (Boediono, 1985:68).

#### **2.2.3.2 Slow-swan**

Robert Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang disebut dengan nama model pertumbuhan *Neo-Klasik*. Seperti halnya dengan model Harold-Domar, model Solow-Swan memutuskan perhatian pada bagaimana pertumbuhan produk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kerangka umum dari

model Solow-Swan mirip dengan model Harold-Domar, tetapi Solow-Swan lebih luas karena:

- a. Menghindari masalah kestabilan yang merupakan ciri *warranted rate of growth* dalam model Harold-Domar.
- b. Dapat lebih luwes digunakan untuk menjelaskan distribusi pendapatan. Keluwesan ini terutama disebabkan karena Solow-Swan menggunakan bentuk produksi yang lebih mudah dimanipulasi secara aljabar (Boediono, 1985:81).

Garis besar proses pertumbuhan yang dibayangkan oleh Solow-Swan yaitu ada 4 (empat) tanggapan yang melandasi model neo-klasik (Boediono, 1985:83), yaitu:

- a. Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu;
- b. Adanya fungsi produksi berlaku setiap periode;
- c. Adanya kecenderungan untuk menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi dari output; dan
- d. Semua tabungan di investasi.

### **2.2.3.3 Teori Schumpeter**

Dari segi teori Schumpeter bisa digolongkan dalam kelompok teori pertumbuhan klasik, namun, dari segi kesimpulan-kesimpulan khususnya mengenai prospek perbaikan hidup masyarakat banyak dalam perekonomian kapitalis, Schumpeter lebih dekat dengan para ekonom modern. Sehingga dalam jangka panjang hidup seseorang bisa dapat

ditingkatkan terus sesuai dengan kemampuan teknologi (dalam arti luas) yang bisa dicapai masyarakat tersebut.

Selain dengan ekonomi modern, ia tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk maupun aspek ketebatasan sumber daya alam dalam proses pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk dianggap tidak diketahui dan tidak ditentukan dalam model. Bagi Schumpeter, motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang diberi nama inovasi dan pelakunya adalah para wiraswasta atau innovator atau enterpreuner. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi para enterpreuner (Boediono, 1985:47).

Proses kemajuan ekonomi menurut Schumpeter, ia membedakan antara pengertian pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Keduanya adalah sumber peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin meningkatnya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Menurut Schumpeter, yang lebih menarik dan lebih penting adalah kenaikan output bersumber dari perkembangan ekonomi.

Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi disini diartikan perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya, penemuan produk baru serta

pembukaan pasar baru dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreatifitas para wiraswastanya. Sejarah kemajuan ekonomi adalah sejarah perkembangan kreatifitas manusia (Boediono, 1985:48).

Ada 5 (lima) macam kegiatan oleh Schumpeter dimasukkan sebagai inivasi, yaitu:

- a. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada;
- b. Diperkenalkannya cara berproduksi baru;
- c. Pembukaan daerah-daerah pasar baru;
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru; dan
- e. Perubahan organisasi industri, sehingga meningkatnya efisiensi industri.

## **2.2.4 Ketimpangan**

### **2.2.4.1 Definisi Ketimpangan**

Ketimpangan adalah mengacu pada standar hidup relatif dari sebuah masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja dan tingkat ketimpangan sangat tinggi (Mudrajat Kuncoro, 1997:103). Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang biasa terjadi dalam kegiatan ekonomi daerah. Ketimpangan pada dasarnya di sebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan letak geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Berdasarkan perbedaan yang ada, kemampuan setiap daerah untuk mendorong kemajuan pembangunan

juga semakin berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setiap daerah terdapat wilayah yang maju (*Developed Region*) dan daerah yang kurang maju (*Undeveloped Region*). Adanya ketimpangan antar daerah ini, membawa implikasi pada kesejahteraan masyarakat antar daerah (Sjafrizal, 2008).

Adelman dan Moris berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan di daerah di tentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran Negara, sumber daya dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Mudrajat Kuncoro, 1997: 111).

Menurut Feids (1980), fakta yang menarik tentang ketimpangan adalah sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 1997: 112):

1. Negara mengalami kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan banyaknya Negara yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan.
2. Kemiskinan absolute menurun dikebanyakan Negara.
3. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan banyak yang berjalan beriringan.

#### **2.2.4.2 Ketimpangan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan trend dalam distribusi pendapatan, ketimpangan pendapatan ini bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu (Kuncoro, 2000):

- a. Ketimpangan Kota dan Desa

Ketimpangan kota dan desa yaitu ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di kota dan di desa.

b. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional adalah ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah atau daerah.

c. Ketimpangan Interpersonal

Ketimpangan interpersonal adalah ketimpangan distribusi pendapatan masing-masing individu (*personal*).

d. Ketimpangan Antar Kelompok Sosial Ekonomi

Ketimpangan antar kelompok social ekonomi adalah ketimpangan distribusi pendapatan dilihat dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin besar pendapatan yang diperoleh.

#### **2.2.4.3 Faktor-faktor Ketimpangan**

Adapun penyebab ketimpangan menurut Tambunan (2001: 190-199), ada beberapa faktor:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
2. Alokasi mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
3. Perbedaan sumber daya alam.
4. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah.
5. Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

#### **2.2.5 Kebijakan Ekonomi dan Ketimpangan**

Williamson (1997) meneliti antara disparitas regional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi Negara yang sudah

maju dan Negara yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu pada tahap lebih matang. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Mudrajat Kuncoro, 2004: 133).

Negara miskin menghadapi masalah klasik yaitu pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasarnya adalah tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan GNP. Bila pertumbuhan terutama disumbang oleh golongan kaya, maka merekalah yang paling mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan secara lebih merata (Mudrajat Kuncoro, 1997: 101).

Simon Kuznets (1995) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Namun, setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Kurva Kuznets lebih banyak terdapat di Negara dengan tingkat pendapatan tergolong menengah papan bawah (Mudrajat Kuncoro, 1997: 105).

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah ratio gini. Nilai ratio gini berkisaran nol dan satu bila ratio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Jika nilai ratio gini

sama dengan satu maka menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati satu orang saja (Mudrajat Kuncoro, 1997: 105).

#### **2.2.6. Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hipotesis simon Kuznets tentang U terbalik yang menyatakan bahwa awal mula pembangunan akan terjadi ketimpangan atau distribusi pendapatan yang tidak merata namun semakin lama dan mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan semakin merata. Dari hipotesis tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah ratio gini. Nilai ratio gini berkisar antara nol dan satu bila ratio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, apabila ratio gini sama dengan satu maka menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja (Mudrajad Kuncoro, 1997: 133).

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap lebih

matang, dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampaknya ada keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Mudrajat Kuncoro, 2004: 133).

#### **2.2.7. Hipotesis Kuznets**

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2004).

Hasil dari penelitian Sutarno dan Mudrajat Kuncoro (2003) menunjukkan kurva berbentuk U terbalik, dimana pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

Analisis kuznets (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan negara

berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut, sehingga terjadilah kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya. Kritik utama kurva kuznets adalah hasil ini sangat sensitif terhadap ukuran inoquality dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 SAMPLE DAN DATA**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan sample di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2004-2013 adalah rentan waktu yang lebih panjang yaitu 10 tahun dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan pembangunan dalam jangka panjang. Sementara data analisis yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan dan jumlah penduduk di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan dengan lokasi penelitian di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan.

#### **1.2 JENIS DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang terkait. Data-data yang diperlukan antara lain adalah data Produk Domestik Regional Bruto Wilayah eks-Karesidenan Pekalongan (PDRB), dan jumlah penduduk di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan masing-masing di tahun 2004-2013.

#### **1.3 METODE ANALISIS DATA**

Dalam analisis, penelitian ini menggunakan metode Tipologi Klassen untuk mendapatkan gambaran pola pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Enthorpy Theil adalah model analisis ketimpangan antar daerah yang digunakan untuk menentukan seberapa besar ketimpangan pembangunan daerah. Penelitian ini juga membuktikan apakah Hipotesis Kuznets berlaku pada Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.1 Tipologi Klassen**

Model ini digunakan untuk mengidentifikasi daerah tertinggal (Arsyad, 2010). Pada tahun 1965 Leo Klassen menciptakan model ini untuk memecahkan permasalahan regional yaitu permasalahan daerah-daerah tertinggal atau terbelakang. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini dibagi menjadi empat, diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Tipe I yaitu daerah makmur adalah daerah yang memiliki prospek yang baik dalam pertumbuhan ekonomi di masa mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat setempat.
- b. Tipe II adalah daerah tertinggal dalam proses membangun. Permasalahan yang terjadi di daerah ini adalah memiliki pendapatan yang relatif rendah namun pertumbuhannya tinggi.
- c. Tipe III adalah daerah makmur yang sedang menurun daerah ini mempunyai pendapatan yang tinggi namun pertumbuhan daerahnya masih rendah, daerah ini memiliki potensi untuk menjadi daerah tertinggal.
- d. Tipe IV termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Daerah ini memiliki pertumbuhan dan pendapatan yang rendah. Pendapatan perkapita masih dibawah rata-rata daerah lain. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif

rendah. Diperlukan pengembangan potensi yang lebih untuk mengejar ketertinggalan di daerah ini.

**Tabel 3.1**

**Klarifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen**

$r$	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Tipe II Daerah tertinggal dalam proses membangun	Tipe I Daerah Makmur
$r_i < r$	Tipe III Daerah makmur sedang menurun (potensial untuk tertinggal)	Tipe IV Daerah tertinggal

Dimana:

$r$  = Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota (%)

$y$  = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota (Rupiah)

$r_i$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota  $i$  (%)

$y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota  $i$  (Rupiah)

Cara menentukan suatu daerah termasuk dalam tipe berapa adalah dengan cara membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan suatu daerah tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam penelitian ini, kasusnya

berada di wilayah Karesidenan Pekalongan jadi cara menentukan tipe daerah adalah dengan cara membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan suatu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Daerah**

Ketimpangan ekonomi antar daerah menggunakan dua metode analisis yaitu:

#### **1.3.2.1 Indeks Ketimpangan Williamson**

Indeks Ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah. Dalam menganalisis indeks ini dapat dilihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita kabupaten/kota di eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004:133)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB per kapita di kabupaten/kota  $i$

$Y$  = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Jawa Tengah

$F_i$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota  $i$

$n$  = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah

Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks mendekati angka satu maka menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Lebih jelasnya terdapat tiga kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson yaitu, (Arsyad: 2010):

- Angka 0,0 sampai 0,2 menunjukkan ketidakmerataan suatu daerah rendah.
- Angka 0,21 sampai 0,35 ketidakmerataan suatu daerah sedang.
- Angka > 0,35 maka ketidakmerataannya tinggi.

### 1.3.2.2 Indeks Entropy Theil

Indeks Entropy Theil digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto kabupaten/kota. Dengan Indeks Entropy Theil dapat dilihat apakah terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Metode Indeks Entropy Theil sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004:134)

$$Tp = \sum i \sum j \left( \frac{Y_{ij}}{Y} \right) \log \left( \frac{\frac{Y_{ij}}{Y}}{\frac{N_{ij}}{N}} \right)$$

Dimana:

$Tp$  = Indeks Ketimpangan Theil

$Y_{ij}$  = PDRB per kapita kabupaten/kota j

$Y$  = Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah

$N_{ij}$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota j

$N$  = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

Indikator Indeks Theil adalah semakin besar nilai indeks Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi, sebaliknya jika nilai indeks semakin kecil artinya semakin kecil ketimpangan yang terjadi dengan kata lain pembangunan terjadi secara merata.

### **1.3.3 Pembuktian Hipotesis Kuznets**

Selain menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil untuk mengetahui adakah ketimpangan yang terjadi di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, penelitian ini juga ingin membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku atau tidak di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Karena dalam analisisnya Kuznets menemukan adanya keterkaitan antara tingkat ketimpangan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita (Arsyad: 2010). Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antara Indeks Ketimpangan Willianson maupun Indeks Theil dapat dibuat grafik. Grafik digunakan untuk membuktikan hipotesis Kuznets terbukti atau tidak di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013 dengan menggunakan kurva “U” terbalik.

Kuznets menganalisis pola-pola pertumbuhan secara historis di negara-negara maju dan mengemukakan bahwa tahap-tahap pertumbuhan di awal distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik, dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk sebuah kurva “U” terbalik. Dari observasi yang dilakukan oleh Kuznets tersebut, kemudian dikenal secara luas tentang konsep kurva Kuznets “U” terbalik (Todaro, 2006: 253).

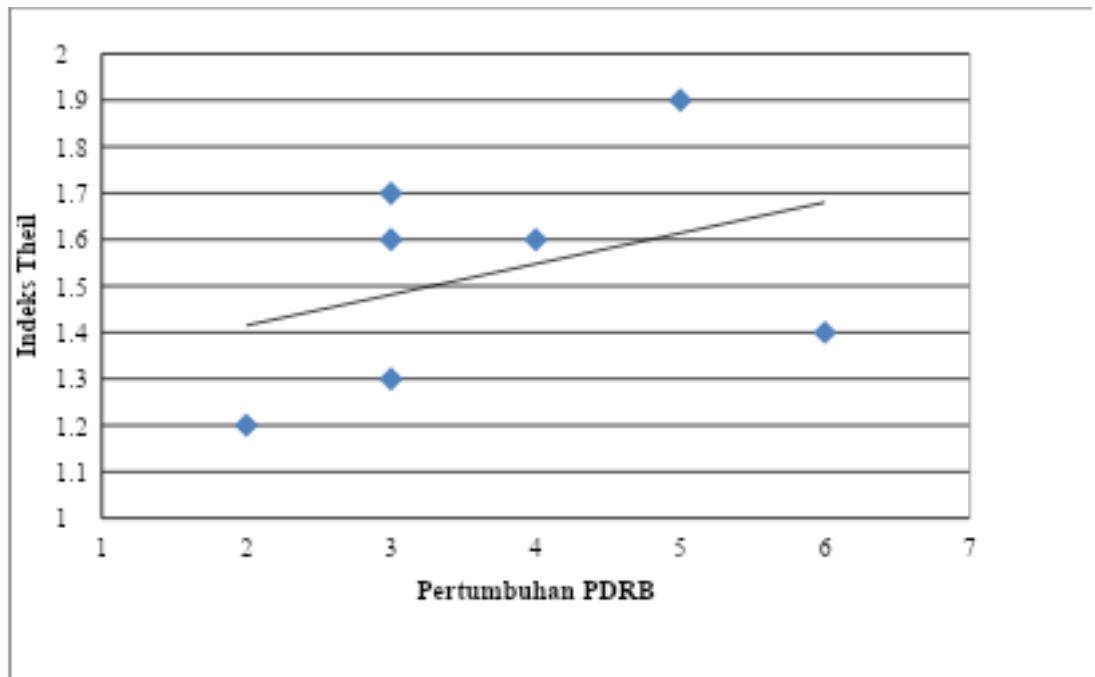
Arsyad (2010) pada tahap awal pembangunan pertumbuhan ekonomi biasanya terpusat pada sektor modern, jadi mengakibatkan lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitasnya tinggi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan yang tinggi pada awalnya, namun pada akhirnya akan menyempit kembali. Dalam hal ini pembuktian kurva “U” terbalik menggunakan cara sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004):

- Menghubungkan antara angka Indeks Williamson dengan pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan
- Menghubungkan antara angka Indeks Entropy Theil dengan pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan

Dengan indikator apabila kedua angka Indeks tersebut menggambarkan kurva “U” terbalik, maka teori Kuznets terbukti di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, namun apabila terjadi sebaliknya, kedua angka indeks tidak menggambarkan kurva “U” terbalik, maka teori Kuznets tidak terbukti di eks Karesidenan Pekalongan. Berikut adalah contoh grafik pembuktian hipotesis Kuznets:

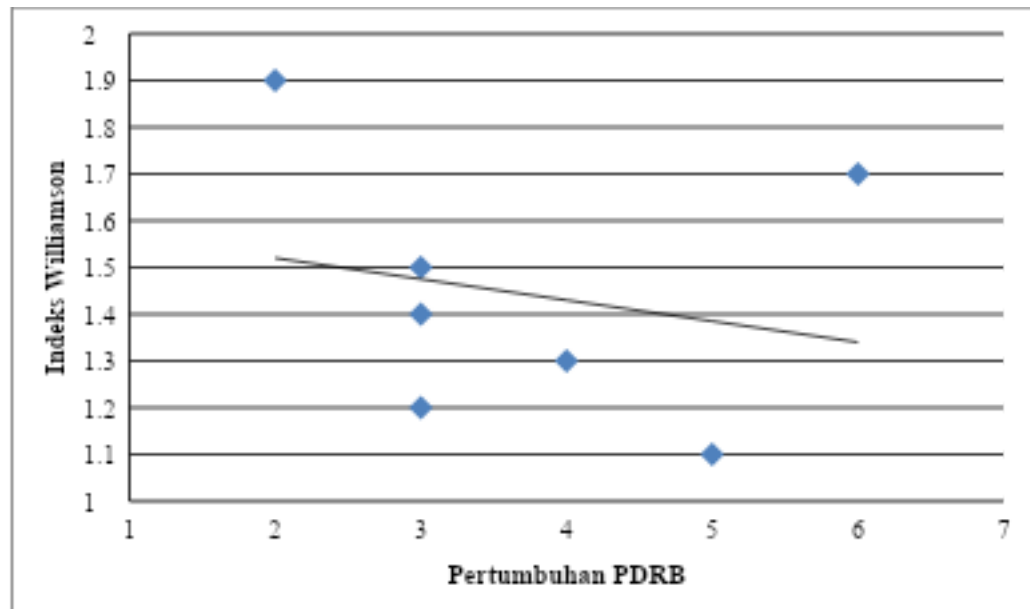
**Gambar 3.1**

**Kurva korelasi antara Indeks Entrophy Theil dengan pertumbuhan PDRB**



**Gambar 3.2**

**Kurva korelasi antara Indeks Williamson dengan pertumbuhan PDRB**



Variabel Y dalam gambar 3.1 adalah Indeks Entropy Theil, sedangkan variabel X adalah PDRB. Gambar tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets terbukti karena kurva berbentuk “U” terbalik. Pada gambar 3.2 variabel Y adalah Indeks Williamson dan variabel X adalah pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets tidak terbukti karena kurva tidak membentuk “U” terbalik.

▪

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1. Hasil Analisis**

Pada bab IV ini akan disajikan secara berurutan mengenai hasil penelitian. Serta disajikan pengolahan data penelitian untuk menjawab hipotesis dan tujuan penelitian yaitu menganalisis pertumbuhan ekonomi dan menganalisis ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Analisis data meliputi Tipologi Klassen, Indeks ketimpangan Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Hipotesis Kuznets.

##### **4.1.1 Tipologi Klassen**

Dua indikator utama yang digunakan pada Tipologi Klassen adalah pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Penentuan klarifikasi dilakukan dengan cara menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB perkapita sebagai sumbu horizontal. Dua indikator tersebut dapat menghasilkan empat klarifikasi sebagai berikut: a). Tipe I yaitu daerah makmur. b). Tipe II adalah daerah tertinggal dalam proses membangun. c). Tipe III adalah daerah makmur yang sedang menurun. d). Tipe IV termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

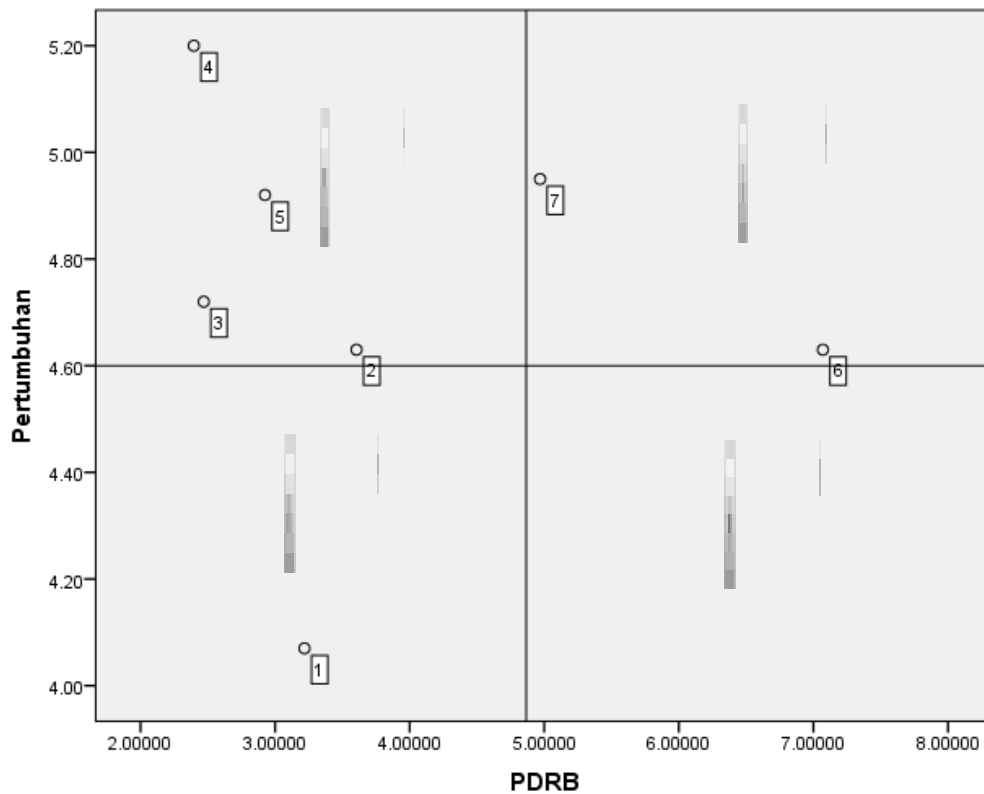
**Tabel 4.1**

**Rata-rata PDRB PerKapitadan Rata-Rata PertumbuhanKabupaten  
di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2004-2013**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-Rata PDRB PerkaitaKabupaten (Juta Rupiah)</b>	<b>Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten (%)</b>
1	Kab. Batang	3.217849	4.07%
2	Kab. Pekalongan	3.604440	4.63%
3	Kab. Pemasaran	2.469559	4.72%
4	Kab. Tegal	2.395910	5.20%
5	Kab. Brebes	2.924254	4.92%
6	Kot. Pekalongan	7.070440	4.63%
7	Kot. Tegal	4.968812	4.95%
	Rata-Rata	3.807323	4.73%

Sumber: Jawa Tengah DalamAngka, 2004-2013

Pada tabel 4.1 rata-rata PDRB per kapita Kota Pekalongan menempati posisi pertama yaitu sebesar Rp 7.070.440, sedangkan untuk rata-rata PDRB per kapita paling rendah sebesar Rp 2.395.910 yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal. Untuk rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Tegal sebesar 5,20% dan rata-rata pertumbuhan PDRB terendah dimiliki oleh Kabupaten Batang sebesar 4,07%. Klasifikasi pola dan struktur perekonomian daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Sumber: Lampiran Diagram Cartesius, 2017.

**Gambar 4.1**

**Rata-rata PoladanStrukturPerekonomiandi Wilayah Eks Karesidenan  
Pekalongan MenurutTipologiKlassenTahun 2004-2013**

Keterangan:

- Tipe I daerah makmur:(1) Kota Pekalongan; (6) Kota Tegal.
- Tipe II daerah tertinggal dalam proses membangun: (2) Kabupaten Pekalongan; (3) KabupatenPemalang; (4) Kabupaten Brebes; (5) Kabupaten Tegal.
- Tipe III daerah makmur yang sedang menurun tidak ada.
- Tipe IV kategori daerah tertinggal: (1) Kabupaten Batang.

Berdasarkan pengklasifikasian menggunakan metodologi Tipologi Kelasenda patdiketahuibahwadari 5 kabupaten dan 2 kota di Wilayah EksKaresidenan Pekalongan, 1 Kabupaten masuk kategori daerah relatif tertinggal yaitu Kabupaten Batang disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDRB di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 pola dan struktur perekonomian daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu:

1. Tipe I yaitu daerah makmur.

Dapat dilihat berdasarkan gambar 4.1 di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yang termasuk daerah makmur adalah Kota Pekalongan dan Kota Tegal, Kota Pekalongan termasuk dalam daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Memiliki penduduk berjumlah 290.807 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5.89% sedangkan untuk rata-rata PDRB per kapita adalah sebesar Rp7.070.440. Kota Tegal masuk dalam daerah yang maju di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Rata-rata PDRB per kapita yang dimiliki Kota Pekalongan mencapai Rp 4.968.812 dan untuk rata-rata pertumbuhannya mencapai 4.93%.

2. Tipe II adalah daerah tertinggal dalam proses membangun.

Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan memiliki empat kabupaten yang memiliki rata-rata PDRB per kapita yang lebih rendah daripada PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah namun, memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Tegal. Rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 3.807323 dan rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 4.73%. Kabupaten Pemalang memiliki rata-rata PDRB per kapita hanya sebesar Rp2.469559 sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 4.72%. Kemudian rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 3.604440 dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4.63%. Untuk Kabupaten Brebes memiliki rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp2.924254 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 4.92%. Kabupaten Tegal memiliki rata-rata PDRB per kapita paling kecil yaitu hanya sebesar Rp2.395910 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 5.20%.

### 3. Tipe III adalah daerah makmur yang sedang menurun

Dalam hal ini di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tidak ada yang Kabupaten atau Kota yang mengalami daerah makmur yang menurun.

### 1. Tipe IV termasuk dalam kategori daerah tertinggal

Di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yang termasuk dalam kategori daerah yang relatif tertinggal adalah Kabupaten Batang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dalam kategori daerah relatif tertinggal ini yaitu hanya mencapai 4,07% dan untuk rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 3.217849.

#### **4.1.2. Indeks Ketimpangan Williamson**

Fungsi dari Indeks ketimpangan Williamson adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah dengan melihat tingkat pemerataan PDRB (Produk Domestik Bruto) per kapita antar

kabupaten. Pengukurannya adalah jika nilai indeks ketimpangan Williamson mendekati nol maka menunjukkan bahwa ketimpangan di suatu daerah semakin kecil atau perkembangan pembangunan merata, dan jika semakin menjauhi nol maka hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan semakin lebar. Hasil perhitungan nilai indeks ketimpangan Williamson antar kabupaten/kota di eks Karesidenan Pekalongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Indeks Ketimpangan Williamson Wilayah Eks Karesidenan 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Williamson</b>
2004	0,178
2005	0,194
2006	0,193
2007	0,207
2008	0,210
2009	0,215
2010	0,212
2011	0,216
2012	0,219
2013	0,225
Rata-rata	0,207

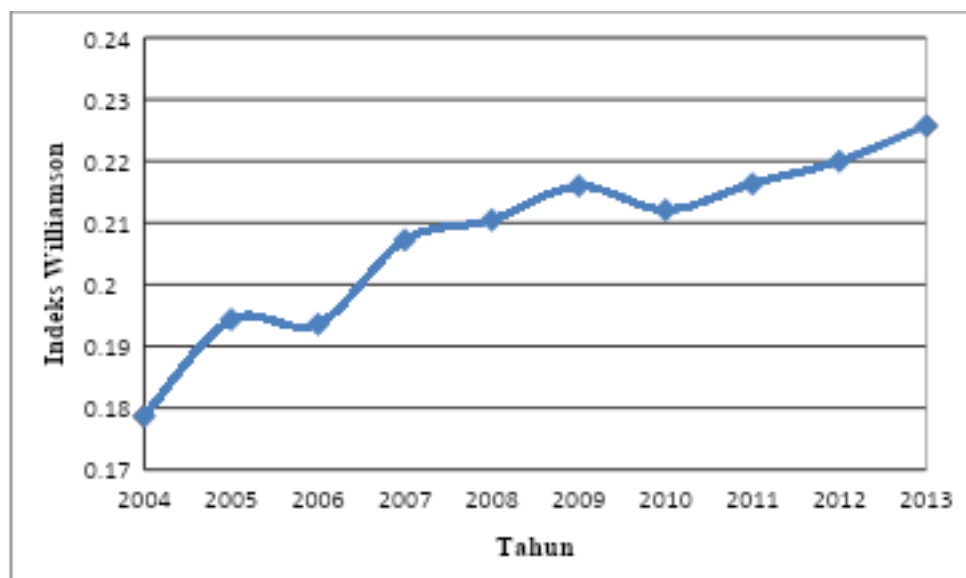
Sumber: Lampiran Indeks Williamson, 2017

Dapat diketahui dari tabel bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama periode 2004-2013 mencapai 0,207 artinya bahwa ketimpangan antar kabupaten yang terjadi di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan termasuk kecil. Namun jika dilihat dari tahun 2004-2013 nilai indeks ketimpangan mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu 10 tahun. Setiap tahunnya Indeks Williamson di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan meningkat rata-rata. Pernah terjadi

penurunan di tahun 2010 dimana mencapai 0,212, kemudian naik setiap tahunnya. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2004 sampai 2005 kenaikannya mencapai 0,016. Nilai ketimpangan yang rendah ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan tidak menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

#### Grafik 4.2 Indeks Williamson

##### Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013



Dilihat dari grafik nilai indek ketimpangan Williamson di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan jika dilihat secara rata-rata tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita antar kabupaten mengalami ketimpangan yang relatif rendah yang dapat dilihat dari nilai ketimpangan antar kabupaten di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013.

#### 4.1.3. Indeks Entropy Theil

Selain menggunakan indeks Williamson, Indeks Entropy Theil juga dapat digunakan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan regional

antar kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Jika nilai indeks Entropy Theil semakin besar menunjukkan pula ketimpangan semakin besar dan apabila nilai menunjukkan semakin kecil maka semakin kecil pula ketimpangan terjadi.

Hasil perhitungan indeks Entropy Theil antar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Indeks Entropy Theil Wilayah Eks Karesidenan 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Entropy Theil</b>
2004	1,102
2005	1,094
2006	0,948
2007	1,098
2008	1,097
2009	1,098
2010	1,079
2011	1,078
2012	1,077
2013	1,076
Rata-rata	1,075

Sumber: Lampiran Indeks Entropy Theil, 2017

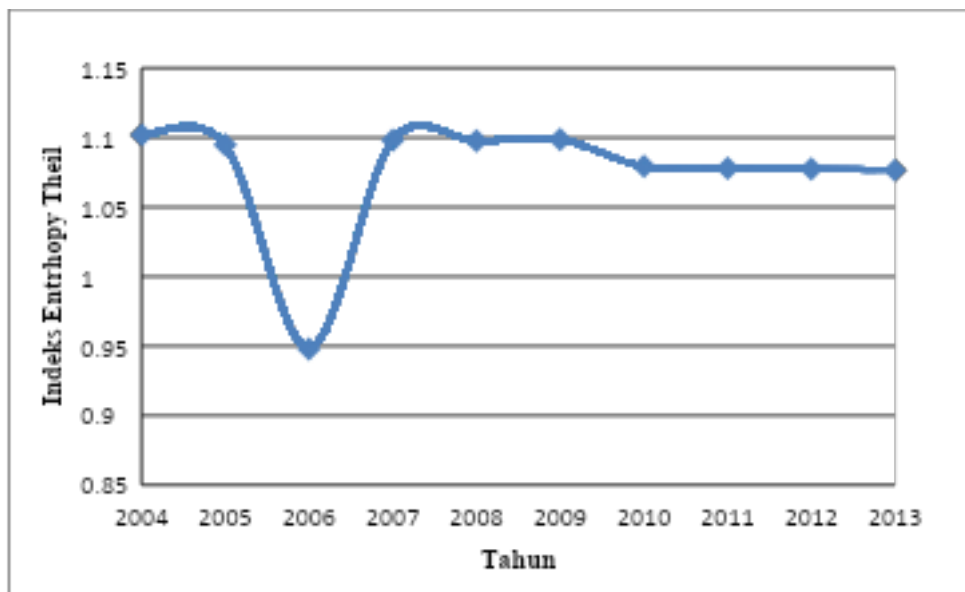
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan indeks Entropy Theil di wilayah eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013 rata-rata ketimpangan sebesar 1,075. Pada tahun 2004 sebesar 1,102 kemudian turun 0,008 pada tahun 2005 menjadi 1,094. Pada tahun 2006 turun sangat signifikan sebesar 0,948 dan tahun 2007 naik sebesar 1,098. Lalu pada tahun 2008 mengalami penurunan 0,001 menjadi 1,097, tahun 2009 kembali naik menjadi 1,098. Tahun 2010 nilai indeks turun sebesar 1,079 dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2013 mengalami

penurunan setiap tahunnya. Secara umum nilai indeks Entropy Theil di Wilayah eks Karesidenan Pekalongan selama tahun 2004-2013 cenderung fluktuatif dan rendah. Grafik indeks Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dapat di lihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.3**

**Grafik Indeks Entropy Theil**

**Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013**



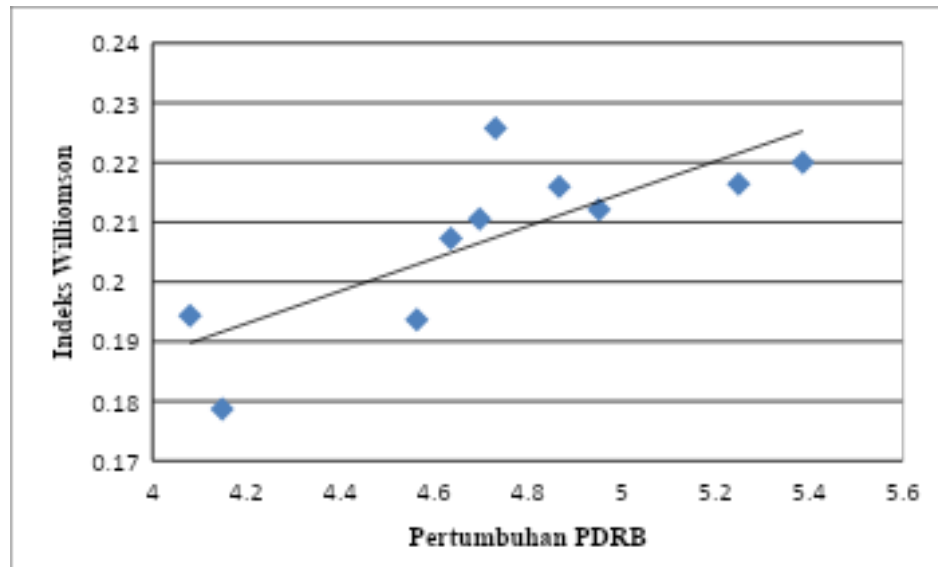
Nilai Indeks Ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan jika dilihat secara rata-rata tingkat Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten mengalami ketimpangan walaupun nilainya relatif kecil, tetapi dapat dilihat bahwa nilai ketimpangan yang terjadi antar daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama tahun pengamatan 2004-2013 bersifat fluktuatif.

**4.1.4 Hipotesis Kuznets**

Hipotesis Kuznets dapat dilakukan dengan cara membuat grafik antara PDRB dengan angka indeks ketimpangan baik Indeks Williamson maupun Entropy Theil. Grafik tersebut menggambarkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson maupun pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Entropy Theil. Grafik antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dapat membuktikan berlaku atau tidak hipotesis Kuznets tentang kurva “U” terbalik. Jika menunjukkan bentuk “U” terbalik maka artinya pada awal pertumbuhan ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu saat akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut terulang kembali. Berikut gambar grafik hubungan antara indeks ketimpangan Williamson dan indeks Entropy Theil dengan pertumbuhan PDRB dapat diketahui apakah hipotesis kuznets “U” terbalik berlaku tidaknya di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan:

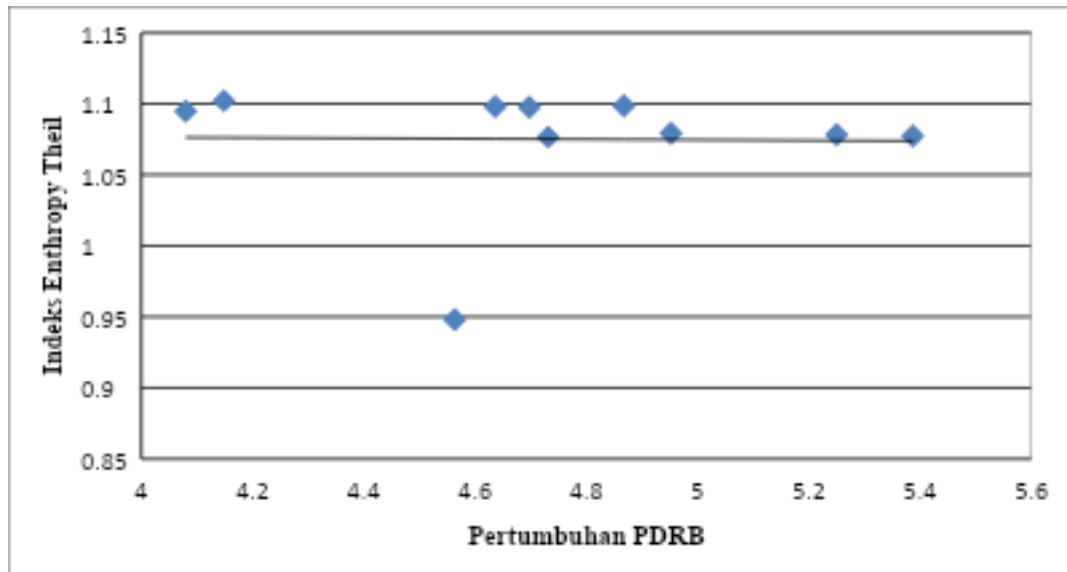
#### **Gambar 4.4**

**Grafik Hipotesis Kuznets Indeks Ketimpangan Williamson  
dengan Pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun  
2004-2013**



**Gambar 4.5**

**Grafik Hipotesis Kuznets Indeks Ketimpangan Entropy Theil  
dengan Pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun  
2004-2013**



Gambar 4.4 dan 4.5 memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson dan Entropy Theil, dimana kurva “U” terbalik belum terbentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets belum terbukti di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan periode waktu 2004-2013. Hal tersebut disebabkan wilayah eks Karesidenan Pekalongan masih dalam tahap awal pembangunan dan tahun observasi yang hanya 10 tahun. Tahun observasi tersebut, kurang mewakili pola ketimpangan teori hipotesis Kuznets. Jika ingin menggunakan data *time series* pada hipotesis Kuznets, maka tahun observasi yang diperlukan harus data *time series* jangka panjang.

## 4.2 Pembahasan

#### **4.2.1 Tepologi Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang termasuk daerah makmur adalah Kota Tegal dan Kota Pekalongan. Memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan diatas rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan banyak daerah tersebut yang menjadi pusat perekonomian bagi daerah-daerah sekitarnya.

Daerah tertinggal dalam proses membangun yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan. Daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di banding rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun pendapatan per kapita masih di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah.

Daerah makmur namun sedang mengalami penurunan pada hasil penelitian tidak ada Kabupaten atau Kota yang mengalami daerah makmur namun mengalami penurunan.

Kabupaten yang masuk dalam daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Batang. Kabupaten-kabupaten ini memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.2.2 Tingkat Ketimpangan antar Daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Williamson dan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan jika dilihat dari rata-rata tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten mengalami ketimpangan yang rendah walaupun dalam perhitungan Indeks Williamson selalu mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari nilai ketimpangan antar daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2004-2013. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda antar daerah, perpindahan tenaga kerja dan modal, serta kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi meningkatnya ketimpangan yang terjadi antar daerah (Adisasmita, 2013). Untuk perhitungan indeks Entropy Theil hasilnya adalah fluktuatif.

#### **4.4.3. Hipotesis Kuznets**

Hasil hipotesis Kuznets antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan menggunakan Williamson di Karesidenan Pekalongan dalam periode tahun 2004-2013 dapat dilihat bahwa hipotesis Kuznets tentang kurva “U” terbalik belum terbukti. Sedangkan untuk hipotesis Kuznets antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan Entropy Theil di Karesidenan Pekalongan pada periode tahun 2004-2013 mengenai kurva “U” terbalik juga belum terbukti. Hal tersebut disebabkan wilayah Karesidenan Pekalongan masih dalam tahap awal pembangunan dan tahun observasi yang hanya 10 tahun. Tahun observasi tersebut, kurang mewakili pola ketimpangan teori hipotesis Kuznets. Jika ingin menggunakan data *time series* pada hipotesis Kuznets, maka tahun observasi yang diperlukan harus data *time series* jangka panjang.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1. Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen**

Berdasarkan Tipologi Klassen dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di Eks Karesidenan Pekalongan dapat di klarifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

a. Tipe I yaitu daerah makmur.

Tipe daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan meliputi 2 kota yaitu Kota Tegaldan Kota Pekalongan. Daerah yang termasuk daerah makmur pada umumnya merupakan daerah yang sudah maju dari segi pembangunan maupun pertumbuhan yang cepat.

b. Tipe II adalah daerah tertinggal dalam proses membangun.

Empat daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yang masuk dalam tipe daerah tertinggal dalam proses membangun antara lain adalah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Kabupaten-kabupaten ini memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang rendah namun rata-rata pertumbuhannya termasuk besar.

c. Tipe III adalah daerah makmur yang sedang menurun.

Daerah yang masuk dalam tipe daerah makmur namun sedang menurun memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang besar namun rata-rata pertumbuhan ekonominya rendah. Namun hal ini tidak ada Kota maupun Kabupaten di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

d. Tipe IV termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Kategori daerah tertinggal tidak hanya memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang rendah, namun juga memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah. Terdapat hanya 1 Kabupaten di Karesidenan Pekalongan yang masuk dalam daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Batang.

#### **5.1.1. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Williamson**

Hasil perhitungan Indeks Ketimpangan Williamson tahun pengamatan 2003-2013 terjadi ketimpangan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 0,162. Ketimpangan antar daerah yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 11 tahun terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2003 Indeks Williamson sebesar 0,147 dan pada tahun 2013 mencapai 0,179. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010 mencapai 0,007. Secara umum nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah semalam periode 2003-2013 mengalami kenaikan.

#### **5.1.3 Ketimpangan Berdasarkan Indeks Entropy Theil**

Hasil perhitungan Indeks Ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2004-2013 mencapai 1.075. Pada tahun 2004 sebesar 1,102 kemudian turun 0,008 pada tahun 2005 menjadi 1,094. Pada tahun 2006 turun sangat signifikan sebesar 0,948 dan tahun 2007 naik sebesar

1,098. Lalu pada tahun 2008 mengalami penurunan 0,001 menjadi 1,097, tahun 2009 kembali naik menjadi 1,098. Tahun 2010 nilai indeks turun sebesar 1,079 dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2013 mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara umum nilai indeks Entropy Theil di Wilayah eks Karesidenan Pekalongan selama tahun 2004-2013 cenderung fluktuatif dan rendah.

#### **5.1.4 Hipotesis Kuznets**

Hasil hipotesis Kuznets antara pertumbuhan PDRB dan Indeks Ketimpangan Williamson di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets mengenai kurva “U” terbalik belum terbukti. Hal yang sama terjadi pada hipotesis Kuznets antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bahwa hipotesis Kuznets mengenai kurva “U” terbalik juga belum terbukti. Hal tersebut disebabkan wilayah eks Karesidenan Pekalongan masih dalam tahap awal pembangunan dan tahun observasi yang hanya 10 tahun. Tahun observasi tersebut, kurang mewakili pola ketimpangan teori hipotesis Kuznets. Jika ingin menggunakan data *time series* pada hipotesis Kuznets, maka tahun observasi yang diperlukan harus data *time series* jangka panjang.

#### **5.2 Saran**

Dalam mengambil kebijakan pembangunan, setiap daerah di Karesidenan Pekalongan sebaiknya tidak terpaku membangun daerah-daerah yang berfungsi sebagai pusat perekonomian saja, tetapi juga pembangunan juga harus terdistribusi pada daerah-daerah sebagai penopang daerah pusat perekonomian dan daerah. Masalah-masalah yang terdapat pada daerah-daerah tertinggal tersebut

meliputi, kemiskinan, jumlah pengangguran yang tidak sedikit, lapangan pekerjaan yang masih minim. Mobilitas dan sarana publik sangat di perlukan untuk mempermudah daerah-daerah yang masih memiliki pendapatan daerah yang relatif kecil menjual hasil sumber daya alam yang dimiliki. Mobilitas dan sarana yang publik yang baik, diharapkan menjadi daya tarik untuk investor agar menginvestasikan dananya untuk membangun sebuah industri yang dapat mempekerjakan masyarakat yang berada daerah relatif tertinggal yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah relatif tertinggal tersebut.

Pada daerah yang termasuk kategori daerah yang makmur, sebagian besar daerah tersebut nilai ketimpangan cukup besar dibanding rata-rata nilai ketimpangan Eks Karesidenan Pekalongan. Hal ini berarti terdapat distribusi pendapatan yang masih belum merata pada daerah yang tergolong makmur tersebut. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk meminimalisasir jarak antara masyarakat yang memiliki pendapatan besar dengan masyarakat yang memiliki pendapatan kecil. Pemerintah dapat melakukan pembekalan keterampilan kepada pekerja kasar yang memiliki penghasilan relatif kecil. Pembekalan keterampilan yang dilakukan, bertujuan agar pekerja memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan penghasilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, Graha Ilmu, Makassar.
- Armstrong, Harvey and Jim Taylor. (1993). *Regional Economic and Policy*, Second Edition, Harvester Wheat sheaf,
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2004-2013). *Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) beberapa terbitan*, BPS Jawa Tengah.
- Beckerman, Wilfred. (1966). *International Comparisons of Real Income*, Paris: OECD Development Centre.
- Boediono. (1985). *Teori Petumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Eka, Putu Mahesa. (2013). *Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 1993-2004*. Skripsi. Universitas Udayana, Bali.
- Kuznets, Simon. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. American Economic Review, pp. 1-28.
- Prasetyo, Agus Eko. (2007). *Analisis Ketimpangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2004*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rizkiya, Siti. (2014). *Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2012*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Rostow, Walt Whitman. (1959). *The Stages of Economic Growth*. The Economic History Review, Vol. XII(1), pp. 1-16.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Bagian Barat*. Prisma. Nomor 3 tahun XXVI. 34-52. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sutarno, dan Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8, No. 2, hal. 97-110, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Todaro, M.P. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*. Erlangga, Jakarta.

